



LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN

**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)
PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO)
DI PROVINSI BALI
TANGGAL 19-21 JUNI 2024**

I. PENDAHULUAN

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/ Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dilakukan antara lain dalam rangka; memperbaiki struktur permodalan BUMN; dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Dari sisi anggaran, dalam Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2023 disebutkan total pembiayaan investasi termasuk PMN sebesar Rp 176 Triliun untuk 6 klaster yaitu; infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional serta klaster lainnya. Adapun pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya. Sedangkan anggaran PMN tunai pada BUMN Tahun 2020—Semester I Tahun 2022 tercatat sebesar Rp135,36 triliun dengan realisasi Rp131,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, sebagaimana dalam LHP BPK RI Tahun 2021, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015—2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut yaitu;

- 1) Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun;
- 2) Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun;
- 3) Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun;
- 4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun; dan
- 5) Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

Dari sisi audit/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir yang terkait dengan pengelolaan PMN pada BUMN, BPK RI melakukan pemeriksaan antara lain:

- 1) Pada Tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan instansi terkait. Terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan.
- 2) Pada Tahun 2021, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Perusahaan ini dibentuk sejak tahun 1960 ini telah berubah status usahanya menjadi Perum pada tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV resmi melebur menjadi satu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Pelindo masuk ke dalam holding BUMN klaster jasa logistik. Dampak dari

pelebaran tersebut antara lain perusahaan memiliki kekuatan dengan skala bisnis lebih besar dan terintegrasi.

Pada Tahun 2021, Pelindo III mendapatkan PMN sebesar Rp1,2 triliun. Lebih lanjut peraturan pemerintah terkait PMN pada Pelindo III ini terdapat pada PP Nomor 92 Tahun 2021 tertanggal 30 Agustus 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. Pada Tahun 2015 tercatat bahwa Pelindo IV menerima PMN sebesar Rp2 triliun sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 119 Tahun 2015 tertanggal 28 Desember 2015.

PMN 2021 digunakan untuk Pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka pengembangan program *Bali Maritim Tourism Hub (BMTH)*. Adapun progress realisasi fisik sejak TW III 2022 sebesar 33% kemudian pada TW I 2023 sebesar 47%, pada TW III 2023 sebesar 55%, pada TW I 2024 sebesar 80% dan estimasi target penyelesaian 100% pada akhir tahun 2024. Dampak dari PMN ini sejak September 2022 s.d. TW I 2023 +/- 40 kapal pesiar telah sandar di Pelabuhan Benoa. Perusahaan juga telah menyalurkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan periode 2022 s.d. 2023 sebesar Rp 3,6 Miliar. Adapun kontribusi Pelindo kepada negara pada Tahun 2022 sebesar Rp 7,2 Triliun atau naik 53% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 4,69 Triliun.

Sedangkan PMN 2015 telah terealisasi 100% yang digunakan untuk penyediaan fasilitas pelabuhan di 9 cabang (Ambon, Ternate, Jayapura, Bitung, Kendari, Tarakan, Merauke, Sorong, Manokwari) dan telah beroperasi sejak 2019.

Dari sisi temuan pemeriksaan pada LHP Tahun 2023 terkait potensi sisa dana Rp65,61 Miliar disebutkan bahwa Sisa dana PMN sebesar Rp65,61 Miliar adalah suatu upaya Pelindo dalam rangka efisiensi penggunaan dana PMN 2021. Kementerian BUMN telah melakukan tindak lanjut sebagaimana dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Pasal 112 ayat 4 yang mengatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan. Adapun tindak lanjut Kementerian Keuangan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Peyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan dan Badan Hukum Lainnya; Selanjutnya DJKN akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT Pelindo (Persero) terkait dana PMN apabila masih tersisa setelah proyek pengerukan selesai 100%.

Berdasarkan uraian tersebut, BAKN DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terkait dengan pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Dengan kunjungan kerja lapangan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan lapangan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja kedepannya serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dilaksanakan pada tanggal 19-21 Juni 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

No.	No. Angg.	Nama	Keterangan
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E, M.M	KETUA BAKN DPR RI/ F-PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F-PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F-PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI/ F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI/ F-GERINDRA
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
8.	--	PARID, S.E., M.H.	KASUBBAG RAPAT
9.	--	RINA SULISTINA, S.E.	STAF SET. BAKN
10.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
11.	--	HAFIZ DWI PUTRA	STAF SET. BAKN
12.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN
13.	--	MITA WAHYUNINGSIH, M.M.	TENAGA AHLI BAKN
14.	--	JAMES HEZARO	STAF SET. ROSID II
15.	--	MARIO HASIOLAN	TV PARLEMEN
16.	--	SAFITRI RESTU WIDYOWATI	METAKSOS

D. Kegiatan Yang Dilakukan

Kunjungan lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dihadiri oleh;

1. Bpk. Sudarsono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Bpk. Boy Robyanto, Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mewakili Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. Bpk. Erwin Fajrin Koordinator BUMN.

BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja ke depannya serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI. Adapun poin-poin penting dalam pertemuan tersebut ialah sebagai berikut.

PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO)

A. PMN PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) PADA TAHUN 2015

PMN pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pada tahun 2015 sebesar 2 Triliun Rupiah digunakan untuk proyek pengembangan 9 Pelabuhan diantaranya:

- 1) Pelabuhan Belitung Total Dana PMN senilai Rp. 342.410.000.000
- 2) Pelabuhan Kendari Total Dana PMN senilai Rp. 654.795.298.033
- 3) Pelabuhan Tarakan Total Dana PMN senilai Rp. 122.496.000.000
- 4) Pelabuhan ambon Total Dana PMN senilai Rp. 126.763.912.445
- 5) Pelabuhan Ternate Total Dana PMN senilai Rp. 127.882.186.359
- 6) Pelabuhan Jayapura Total Dana PMN senilai Rp. 202.240.178.519
- 7) Pelabuhan Merauke Total Dana PMN senilai Rp. 104.800.167.036
- 8) Pelabuhan Sorong Total Dana PMN senilai Rp. 276.015.855.361
- 9) Pelabuhan Manokwari Total Dana PMN senilai Rp. 46.117.668.000

B. PMN PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) PADA TAHUN 2021

PMN Tahun 2020 pada PT Pelindo dipergunakan untuk Pengembangan Pelabuhan Benoa dengan Pengembangan BMTH Bali Maritime Tourism Hub. Sesuai PP-RI No 92 Tahun 2021, dana PMN sebesar Rp 1.200.000.000.000 merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), yang digunakan untuk paket pekerjaan lanjutan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa. Paket pekerjaan BMTH lainnya menggunakan anggaran RKAP PT Pelindo.

Keseluruhan paket pekerjaan di dalam PSN Pengembangan BMTM diharapkan antara lain dapat menjadikan Bali sebagai Hub Pariwisata Maritim, peningkatan kapasitas kapal pesiar 4x lipat menjadi 600 kunjungan / tahun dengan kapasitas terminal penumpang 3x lipat yaitu 3,2 juta orang / tahun, dan membangun Tourism Ecosystem di Provinsi Bali. Sampai dengan Mei Tahun 2024, progress realisasi fisik / konstruksi adalah 81,10% dan Realisasi Dana PMN adalah sebesar 54,73%

Pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai tourism hub di Indonesia akan menjadikan Pelabuhan Benoa sebagai pusat rute pelayaran cruise di Indonesia. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Benoa sebagai maritime tourism hub akan memberikan multiplier effect terhadap perubahan – perubahan dalam konsep butterfly route cruise di Indonesia seperti Pelabuhan Tg Emas, Tg Perak, Gilimas, Labuhan Bajo, Raja Ampat, Makasar, Manado, Ambon, Kumai, Pontianak dan lain-lain. Selain itu, kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan-Pelabuhan tersebut juga akan memberikan multiplier effect kepada ekonomi masing-masing daerah

C. KENDALA DAN HAMBATAN PENYERERAPAN PMN

Beberapa kendala terkait dengan penyerapan PMN Tahun 2021 untuk proyek BMTM ini adalah adanya aksi masyarakat yang timbul dan berdampak pada keterlambatan pekerjaan. Selanjutnya pemberitaan di media terkait proses perijinan pekerjaan yang tidak lengkap oleh PT Pelindo sehingga proyek tidak kondusif. Terhadap kendala tersebut Pelindo telah melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait dalam menghadirkan solusi yang terbaik untuk semua pihak dan untuk pemberitaan di media, PT Pelindo telah melakukan tanggapan tertulis melalui humas PT Pelindo kepada media.

Keterlambatan pekerjaan akibat kesiapan lahan dan perijinan mengakibatkan timbulnya implikasi biaya pada penyedia jasa. Pelindo telah melakukan perhitungan secara cermat terhadap implikasi biaya yang timbul, serta melibatkan pihak ketiga apabila diperlukan.

Hambatan pada penyerapan PMN Pelindo diantaranya adalah tidak seiringnya antara kesiapan lahan, dan perijinan sehingga pelaksanaan tertunda. Pelindo telah melakukan percepatan proses administrasi, pembebasan lahan, serta perijinan terkait dalam rangka langkah strategis untuk percepatan. Kemudian untuk perencanaan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan tantangan di lapangan sehingga perlu adanya penambahan waktu pelaksanaan. Atas hambatan ini PT Pelindo telah melakukan proses justifikasi teknis yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian penambahan waktu pelaksanaan. Atas permasalahan keterlambatan proses pekerjaan baik itu pengadaan material, man power,

maupun kesiapan alat, PT Pelindo telah melakukan penambahan sumber daya pada pelaksanaan Pekerjaan PMN (SDM, Peralatan dan waktu pekerjaan).

DAMPAK DARI HOLDINGISASI PT PELINDO

Penggabungan Pelindo telah menciptakan kapasitas finansial yang lebih kuat dan optimalisasi kapasitas aset yang terintegrasi diantaranya:

1. Optimalisasi Financing Cost. Hal ini dapat meningkatkan akses pendanaan dengan lebih efisien melalui optimalisasi kas dan liabilitas serta Pelunasan Hutang di Induk dan Anak Perusahaan, Pelaksanaan Aksi Buyback Global Bonds, serta Optimalisasi Cost Of Fund di beberapa anak perusahaan.
2. Relokasi Aset. Relokasi aset akan meningkatkan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi biaya capex melalui pemanfaatan bersama / sharing aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Relokasi peralatan pada tahun 2022 diantaranya 3 unit QCC, 6 unit RTG, 1 unit RST, 4 unit HT & Chassis.
3. Pengadaan Bersama. Pengadaan bersama dapat berdampak baik untuk konsolidasi Pengadaan terhadap beberapa jenis kategori barang tertentu untuk mencapai economic of scale. Hal ini untuk menciptakan efisiensi biaya pengadaan dan mengoptimalkan Capex. Kategori Pengadaan Bersama diantaranya BBM, Jasa Alih Daya/TNO dan Security, Sewa Kendaraan, ePurchasing, ATS SAP & Oracle , Seragam Dinas.
4. Alokasi Modal Terintegrasi. Optimalisasi CAPEX melalui mekanisme seleksi dan prioritas terhadap seluruh usulan investasi Pelindo group. Melalui alokasi modal terintegrasi, Pelindo dapat memfokuskan CAPEX pada investasi yang memiliki compliance dan benefit yang signifikan.

TANGGAPAN DAN RESPON DARI ANGGOTA BAKN DPR RI

H.WAHYU SANJAYA, S.E, M.M

- 1) Proses merger yang telah dilakukan pada BUMN dapat dikatakan ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. PT Pelindo diharapkan dapat berhati-hati dalam melakukan proses holding agar dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan.
- 2) Pemberian PMN kepada PT Pelindo salah satunya melalui Proyek BMTH diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI

- 1) Target dan capaian dari pemanfaatan Bali Maritime Tourism Hub oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Diharapkan dapat meningkatkan jumlah kapal pelayaran yang sandar di Bali menjadi empat kali lipat dari saat ini.
- 2) Menanggapi kinerja keuangan yang telah dicapai Pelindo yaitu pada Net Income yang mengalami kenaikan tidak signifikan setelah melakukan holding. PT Pelindo menanggapi bahwa kenaikan Net Income yang tidak signifikan karena kebijakan pada dua tahun pertama masih menggunakan biaya dari masing-masing sub holding. Selain itu perlunya harmonisasi biaya pegawai untuk gaji karyawan Pelindo I dan Pelindo II.

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

- 1) PT Pelindo diharapkan dapat memberikan data terkait laporan keuangan PT Pelindo pada periode sebelum holding dan pasca holding. Data ini diperlukan untuk menjadi pembanding bagaimana kinerja perusahaan sebelum dan sesudah proses holding. Aktivitas perusahaan seperti merger atau holding diharapkan dapat memberikan efek yang positif bagi perusahaan.
- 2) Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN menjadi sangat penting untuk mendorong daya saing BUMN dengan perusahaan swasta. BAKN DPR RI mengharapkan agar temuan-temuan yang didapatkan oleh BAKN terkait dengan PMN dapat menghasilkan rekomendasi agar sinergitas lintas BUMN dapat ditingkatkan.

H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

- 1) Secara jangka panjang, Bali dapat menjadi tujuan kapal cruise. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlunya mendorong Kementerian Keuangan untuk mendukung penuh proses pengerukan pelabuhan Bena.

- 2) Regulasi terkait dengan sisa PMN belum teralokasikan penggunaannya perlu segera dibahas oleh BAKN, Komisi XI dan Kementerian Keuangan. Adanya perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dimana Kementerian Keuangan selalu mendorong pengembalian sisa dana PMN sedangkan Kementerian BUMN ingin agar sisa PMN tetap digunakan.
- 3) Dampak ekonomi dari sandar kapal cruise ini sangat tinggi. Akan tetapi masih terbatas untuk 300 meter. PT Pelindo menyatakan bahwa persiapan sandar kapal cruise ini harus dilakukan setahun sebelumnya.
- 4) Informasi dan data yang didapatkan hari ini dari PT Pelindo dapat memperkaya BAKN dan DPR RI dalam membahas penguatan rencana anggaran BUMN.
- 5) Tujuan kapal cruise sudah memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelabuhan Benoa harus menjadi Home Port untuk meningkatkan volume kapal bersandar.
- 6) Adaanya regulasi dan peraturan tentang sandar labuh kapal Internasional yang melibatkan INSA serta Kementerian Pehubungan dapat ditinjau kembali untuk memaksimalkan pemanfaatan BMTH.

Ir. IRWAN ARDI HASMAN

- 1) Tujuan dan manfaat PMN seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya dengan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu dengan adanya konsolidasi antara PT Pelindo dan pemerintah Provinsi Bali diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi BMTH.
- 2) Pemanfaatan Proyek Bali Maritime Tourism Hub sudah cukup baik akan tetapi perlunya diperhatikan bagaimana fasilitas dan pelayanan kepada wisatawan.
- 3) Skema Proyek Bali Maritime Tourism Hub diharapkan dapat diadaptasi untuk daerah lain untuk membuka lapangan kerja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan kunjungan lapangan ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) ialah sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI memberikan apresiasi terhadap realisasi PMN oleh PT Pelindo. Pemberiaan PMN kepada PT Pelindo salah satunya dipergunakan untuk Pengembangan Proyek Bali Maritime Tourism Hub diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Proses merger atau holding yang telah dilakukan pada BUMN dapat dikatakan ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. PT Pelindo diharapkan dapat berhati-hati dalam melakukan proses holding. Proses merger atau holding diharapkan dapat memberikan efek yang positif bagi perusahaan.
3. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN menjadi sangat penting untuk mendorong daya saing BUMN dengan perusahaan swasta. BAKN DPR RI mengharapkan agar temuan-temuan yang didapatkan oleh BAKN terkait dengan permasalahan PMN nantinya akan ditelaah lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi pada peningkatan sinergitas lintas BUMN.
4. Regulasi terkait dengan sisa PMN belum teralokasikan penggunaannya perlu segera dibahas oleh BAKN, Komisi XI dan Kementerian Keuangan. Adanya perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dimana Kementerian Keuangan selalu mendorong pengembalian sisa dana PMN sedangkan Kementerian BUMN ingin agar sisa PMN tetap digunakan
5. BAKN DPR RI sangat mengapresiasi proyek pengembangan Bali Maritime Tourism Hub yang dapat memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Skema Bali Maritime Tourism Hub ini diharapkan nantinya dapat diadaptasi oleh daerah lain untuk mendorong perkonomian dan membuka lapangan kerja.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Dengan pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).